DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2017). Informasi APBN 2017. Diakses pada 22 November 2017 dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui e-Filing. Diakses pada 25 Januari 2018 dari <http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses pada 24 Januari 2018 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Siap-Siap 1 Juli 2016, Bayar Pajak Harus Dengan e-Billing. Diakses pada 25 Januari 2018 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/siap-siap-1-juli-2016-bayar-pajak-harus-dengan-e-billing>

- Gunanto, R. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Bengkulu. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Hadyan, D. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Prtama Kabupaten Pandeglang. *Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah Vol.11 No.6*, 24-36.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan Vol.1 No.2*, 59-73.
- Handayani, W. (2017). Pengaruh Billing System Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 102-115.
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-filing, E-billing, dan E-faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 1 No.1*, 97-106.
- Murry, M. S., Sinarwati, N. K., & Yuniarta, G. A. (2017). Persepsi Fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan E-Billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *e-Journal SI Ak Vol.7 No. 1*.
- Nasution. (2011). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1 No. 2*, 145-162.

- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pratami, L. P., Sulindawati, N. L., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *e-Journal SI Ak Vol. 7 No. 1*.
- Prawoto, N., & Basuki, A. T. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Raharjo. (2017). Makna Koefisien Determinasi [R Square] Dalam Analisis Regresi Linear. Diakses pada 8 2018 dari <https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html>
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Cara Perpajakan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Kementerian Keuangan. Jakarta.

- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2017). Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2017 Tentang Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penetapan Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017. Kementerian Keuangan. Jakarta
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2015). *Structural Equation Modeling (SEM)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2015). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi Vol. 15 No. 1*, 49-64.
- Tim Redaksi Ortax. (2014). Mengenal Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (e-Billing). Diakses pada 25 Januari 2018 dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=35>
- Zainuddin. (2017). Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses pada 24 Januari 2018 dari pengertiankompli.blogspot.co.id/2017/04/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html